

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Di era global ini masalah-masalah gender yang muncul ke permukaan adalah penindasan dan eksploitasi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan Negara. Masalah lain yang sering muncul adalah perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa, yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan, budaya, maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap seolah-olah ketentuan Tuhan. Sebaliknya melalui dialektika, konstruksi sosial gender secara evolusional dan perlahan-lahan bisa dikonsepsi ulang.

Istilah gender menurut Oakley (1972) dalam hal “*sex, gender dan society*” berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara “gender” adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang

panjang. Sedangkan menurut Caplan (1987 : 106) dalam “ *The Cultural Contruction of sexuality*” menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologi (sex) tetap tidak berubah. Gender dalam pengertian ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi laki-laki dan perempuan.

Fungsi sosial masing-masing tercakup di dalamnya pembagian kerja, pola relasi kuasa, perilaku, peralatan, bahasa, persepsi yang membedakan laki-laki dengan perempuan dan banyak lagi. Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak universal. Artinya berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jadi pola relasi gender di Yogyakarta misalnya sangat berbeda dengan di Aceh, juga berbeda dengan di Saudi Arabia.

Jadi, konsep gender ialah suatu sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat baik secara kultural maupun sistematis. Misalnya perempuan secara kultural dikenal lemah, lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan, perkasa. Perempuan juga sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya emosional, tukang ngerumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit dan lain sebagainya. Sesungguhnya keadaan seperti di atas biasanya terjadi karena sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditanggung oleh perempuan. Terutama terhadap ketidakadilan dalam pendidikan perempuan.

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama perempuan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Mansour fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinisasi, stereotif, kekerasan beban ganda dan sosialisasi ideology dan nilai peran gender. (Mansour Fakhi 2002 : 95)

Perempuan yang berpendidikan dan mempunyai kesehatan yang baik akan mempunyai kesempatan untuk aktif bekerja secara produktif pada sektor-sektor formal serta akan menikmati pendapatan yang baik dibanding dengan perempuan yang tidak mempunyai pendidikan dan sakit-sakitkan. Selain itu, perempuan yang punya pendidikan akan memberikan perhatian yang lebih besar pada anak-anaknya yang merupakan investasi bagi masa depan anak-anak.

Ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan perenserta perempuan agak salah arah, sehingga justru mengakibatkan beban yang berganda-ganda bagi perempuan tanpa hasil yang menguatkan kedudukan perempuan sendiri. Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk diperkarakan karena berbagai hal sebagai berikut. Anggapan umum bahwa aktivitas atau peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan, yang sifatnya tentu sangat privat. Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan

gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriaki yang terlanjur mendarah daging. Mereka rela, ikhlas pasrah terhadap ideologi yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat saja atau objek keinginan patriaki. (Mansour Fakhi : 2002 : 115)

Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa. “setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan Cuma-Cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia”. Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial. Dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender yang lebih adil di masyarakat. (Ibtiroh : 2000 : 89)

Pernyataan di atas di kemukakan karena telah terjadi banyak ketimpangan gender dimasyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat dalam perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang terdapat di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama/umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang membuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral

gendar baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada empat aspek yang disorot oleh departemen pendidikan nasional mengenai permasalahan gender dalam dunia pendidikan yaitu akses, Partisipasi, proses pembelajaran dan penguasaan. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya banyak sekolah dasar di tiap kecamatan namun tidak untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak, tidak setiap wilayah memiliki tingkat SMP dan seterusnya. Hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak-anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. Karena jarak sekolah terlalu jauh dari rumah dan ekonomi/dana yang kurang memenuhi buat keberlangsungan pendidikan.

Membicarakan tentang ketidakadilan Gender terhadap pendidikan perempuan yang dialami oleh kaum perempuan sendiri baik wanita karir, ibu rumah tangga, selalu membebani pundak mereka. Apakah itu karena pendidikan yang dikenyamnya masih rendah, atautkah karena kultur patriaki yang begitu

kental dan sulit untuk di dobrak. Dan bagaimana meningkatkan pendidikan perempuan di zaman sekarang.

Dengan permasalahan tersebut penulis berusaha untuk memperjelas lebih jauh tentang “AKSES PEREMPUAN TERHADAP PENDIDIKAN (Studi Kasus di Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program meningkatkan pendidikan perempuan di Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat terjadinya bias gender terhadap pendidikan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program peningkatan pendidikan perempuan di Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terjadinya bias gender terhadap perempuan di Kelurahan Karangmulya Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah pembendaharaan keilmuan sosial yang kemudian dikorelasikan dengan konteks sosial di masyarakat khususnya dalam kajian gender
 - b. Memberikan wawasan baru terhadap generasi pengganti dalam keluarga setempat yaitu di Kelurahan Karangmulya Kecamatan

Karangpawitan Kabupaten Garut relasi gender dalam masyarakat dalam pentingnya pendidikan Gender.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan strata satu (S1) di jurusan Sosiologi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya perspektif gender tidak mempermasalahkan pembedaan-pembedaan antara laki-laki dan perempuan, selama tidak melahirkan ketidakadilan akan tetapi dalam analisisnya, kerap terungkap bahwa pembedaan secara gender sangat potensial melahirkan ketidakadilan gender. (Nasrudin Umar : 1998 : 123)

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan tuhan) dan bentuk budaya (kontruksi soial). Seringkali orang mencampur-adukan cirri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki. (Nasrudin Umar : 2007 : 34)

Untuk memahami gender lebih lanjut, perlu diperhatikan juga mengenai terjadinya ketidakadilan gender, Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender

merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. (Haifaa A. : 1999 : 126)

Ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat di antaranya, yaitu:

- a. Stereotip/citra baku, yaitu pelebelan terhadap salah satu jenis kelamin yang sering kali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru taman kanak-kanak, kaum perempuan ramah dianggap genit, kaum laki-laki ramah dianggap perayu.
- b. Subordinasi/penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh : Sejak dulu, perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah” atau “teman yang ada di belakang”
- c. Marginalisasi/peminggiran, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus / pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan, Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh

perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

- d. Beban ganda /*Double burden*, yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. (Haifaa A. : 1999 : 130)

Permasalahan pembedaan, tidak hanya terlihat di ranah domestik tetapi mulai masuk dalam segala sisi masyarakat mulai dari keluarga, masyarakat, politik, ekonomi, dan pendidikan. Pembedaan-pembedaan ini pada batasnya telah menggiring perempuan pada sebuah struktur penomorduan dalam segala bidang. Dan secara tidak langsung menjadi penyebab lambanya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dikutip Putnam Tong, bahwa dalam hak pendidikan individu telah terjadi penekanan atas yang lain. Di sini Wollstonecraft melihat bahwa pendidikan perempuan secara tidak langsung menjadi faktor yang mendorong timbulnya kesejahteraan keluarga. Sebagai sebuah relasi dari suami, seorang istri harus memiliki pendidikan yang sama sehingga seorang istri tidak menjadi penghancur bagi suaminya, namun akan ikut mendorong dalam segi finansial. Wollstonecraft, menyakini bahwa hanya dengan pendidikan yang sama tanpa ada pembedaan-pembedaan gender, keduanya akan menjadi relasi yang seimbang (Putnam Tong, 2008: 19)

Dalam sistem hak individu terdapat kerangka kerja dimana setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih kebaikan menurut individu itu sendiri meskipun dengan satu catatan bahwa pilihan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Sehingga individu berhak mengisi rasionalitasnya dengan pendidikan yang dia pilih.

Subordinasi berupa penomorduan terhadap perempuan ini akibat pendidikan yang *male oriented*. Pandangan yang mengedepankan pendidikan laki-laki dari pada perempuan, dengan konsep bahwa anak laki-laki menjadi kepala keluarga, kepala desa, pimpinan perusahaan/kantor dan sebagainya.

John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill, kemudian menekankan pentingnya perempuan mengekspresikan keinginannya dan berani meraih kebahagiaan yang mereka inginkan dan bukan berdasarkan apa yang orang lain inginkan. Kedua orang ini lebih jauh mengkritik masyarakat untuk tidak hanya sekedar memberikan pendidikan yang sama bagi perempuan dan laki-laki tetapi juga agar masyarakat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam hal kebebasan sipil dan kesempatan ekonomi sebagaimana yang dikikmati laki-laki (Putnam Tong, 2008 : 23)

Pendekatan melihat peran perempuan dalam Pendekatan anti kemiskinan atau anti properti approach dikenal sebagai pendekatan emosional, dimana ketidakadilan ekonomi antara perempuan dan laki-laki tidak dikaitkan dengan persoalan subordinasi, tetapi dengan kemiskinan, karena itu penekanannya bergeser dari upaya untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan, di sisi persoalan

perempuan dipisahkan dari persoalan keadilan dan dikaitkan dengan persoalan tertentu yang dihadapi mayoritas perempuan di dunia ketiga yang merupakan kaum termiskin dari yang miskin. Pendekatan ini merupakan versi lain dari pendekatan keadilan, yang muncul sebagai akibat keengganan lembaga-lembaga pembangunan untuk melakukan campur tangan terhadap cara hubungan antara laki-laki dan perempuan terbentuk dari suatu masyarakat tertentu. Betapapun, pergeseran ini bersamaan dengan berakhirnya Dekade pembangunan pertama yang tidak berhasil baik, dan perumusan model-model alternatif pembangunan ekonomi dan sosial dunia ketiga. (Putnam Tong : 1998 : 28)

Menurut caroline O.N. mosser pendekatan efisiensi saat ini merupakan pendekatan utama yang dipergunakan oleh mereka yang bekerja dalam rangka meningkatkan harkat derajat perempuan, bahkan di lain tempat pun mungkin pendekatan ini merupakan satu-satunya yang dipakai. Pada pendekatan efisiensi, tekanan bergeser dari perempuan ke pembangunan, dengan asumsi bahwa meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan di dunia ketiga secara otomatis berkaitan dengan meningkatnya keadilan. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi seperti USAID. Bank dunia dan Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (ODEC)berpendapat bahwa meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dalam pembangunan mengaitkan efisiensi dan keadilan. (Lies. M. Marcoes : 1993 : 87)

Pendekatan tentang kebijakan bagi kaum perempuan adalah pendekatan *empowerment* (penguatan diri) yang masih belum dikenal luas sebagai “pendekatan”, dan juga belum terdokumentasi, meskipun asal usul pendekatan ini

bukanlah baru. Sepintas dan sering juga dikatakan sebagai kombinasi pendekatan keadilan. Dalam banyak hal pendekatan ini berkembang sebagai akibat ketidakpuasan. Akibat ketidakpuasan terhadap pendekatan awal WID (*woman in development*) seperti pendekatan keadilan, karena dianggap dikooptasikan ke dalam pendekatan anti kemiskinan dan efisien. Namun betapapun pendekatan ini berbeda dengan pendekatan keadilan bukan saja dalam asal-usulnya tetapi juga dalam sebab-sebab, dinamika dan struktur penindasan perempuan yang diusutnya.

F. Metode dan langkah-langkah

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis bertempat tinggal di daerah tersebut sehingga menunjang dan memungkinkan terhadap kelangsungan penelitian. Selain itu penelitian ini didasarkan pada pertimbangan adanya hal menarik yang berkaitan dengan Akses perempuan terhadap pendidikan. masyarakat sekitar khususnya perempuan dan pendidikan. Pertimbangan lainnya yang mendukung pemilihan lokasi di atas sebagai objek penelitian dikarenakan belum ada pihak yang meneliti di daerah tersebut yang bersangkutan dengan permasalahan di atas.

2. Metode penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Yaitu sebuah metode yang cirinya memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang

bersifat aktual serta menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai adanya diiringi dengan interpretasi rasional, caranya dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek kajian. (Moleong, Lexy : 2006 : 15)

3. Jenis Data

Data menurut *webster new world dictionary*(1998 : 228) yaitu *thing known or assumed* (sesuatu yang diketahui atau dianggap sesuatu yang terjadi dan merupakan fakta). Dalam data penelitian ini adalah kualitatif verbal yaitu data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara pada masyarakat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Data tersebut mengenai Akses Perempuan Terhadap Pendidikan.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu.

Data primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari hasil observasi maupun wawancara sebanyak 10 keluarga. Data yang diambil berdasarkan dari sampel dari jumlah populasi.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tambahan seperti buku, majalah jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan penguatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dilakukan dengan dua cara yakni :

(a). observasi non sistematis, yang dilakukan pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan

(b). observasi sistematis yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Teknik ini dipergunakan untuk mengangkat data serta fakta yang tidak terduga oleh teknik observasi. Karena itu, wawancara sebagai bentuk sekunder yang dilakukan terhadap warga termasuk ke dalam sumber data.

c. Dokumentasi dan pustaka

Dokumentasi diperlukan untuk menunjang dan memperkuat data yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dan kepustakaan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

d. Analisis data

Data dari lapangan mengenai akses perempuan terhadap pendidikan. dikelompokkan dan diberi simbol atau kode-kode tertentu kemudian dianalisis secara logis secara induktif yaitu satu persatu dari tiap kelompok dianalisis kemudian pada tahap akhir dibuat kesimpulan secara menyeluruh.